

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2020-2024

Anis Nur Aidah^{1*}, Mulia Inda Purwati², A. Rozi³

¹⁻³Program Studi Manajemen, Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: aniscorn6@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the financial performance of the Jambi City Government during the 2020–2024 fiscal period. This research is motivated by the suboptimal management of regional finances, as indicated by revenue realization that has not consistently achieved the targeted amount and the high dependence on transfer funds from the central government. The method used in this study is a qualitative descriptive approach using secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA). The analysis was conducted using financial ratios, including efficiency, effectiveness, growth, and fiscal dependency ratios. The results show that the financial performance of the Jambi City Government during 2020–2024 was generally categorized as fairly good. This is indicated by the efficiency ratio, which ranged from 75% to 79%, and was categorized as efficient, while the effectiveness ratio ranged from 83% to 96%, which was categorized as fairly effective to effective despite annual fluctuations. The regional revenue growth ratio showed a positive trend, with growth values of 8% in 2021, 14% in 2022, 3% in 2023, and 2% in 2024, although growth slowed toward the end of the period. Meanwhile, the fiscal dependency ratio ranged from 73% to 77%, indicating a high level of dependency because the regional government still relied heavily on transfer funds from the central government. Therefore, efforts to optimize Local Own-Source Revenue (PAD) are needed to improve regional fiscal independence.

Keywords: Effectiveness Ratio; Efficiency Ratio; Fiscal Dependency; Growth Ratio; Regional Financial Performance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama periode tahun anggaran 2020–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan realisasi pendapatan yang belum konsisten mencapai target serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis dilakukan melalui rasio keuangan yang meliputi rasio efisiensi, efektivitas, pertumbuhan, dan ketergantungan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi tahun 2020–2024 secara umum berada pada kategori cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio efisiensi yang berada pada kisaran 75%–79% sehingga tergolong efisien, serta rasio efektivitas yang berada pada kisaran 83%–96% sehingga termasuk kategori cukup efektif hingga efektif meskipun mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio pertumbuhan menunjukkan tren positif dengan nilai pertumbuhan sebesar 8% pada tahun 2021, 14% pada tahun 2022, 3% pada tahun 2023, dan 2% pada tahun 2024, meskipun mengalami perlambatan pada akhir periode. Sementara itu, rasio ketergantungan fiskal berada pada kisaran 73%–77% sehingga tergolong tinggi karena pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: Ketergantungan Fiskal; Kinerja Keuangan Daerah; Rasio Efektivitas; Rasio Efisiensi; Rasio Pertumbuhan.

1. LATAR BELAKANG

Penerapan otonomi daerah memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan, termasuk dalam hal keuangan. Dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian keuangan dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengelola anggaran secara efisien dan efektif (Hartoto, 2016). Namun, pada praktiknya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi kendala dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mengelola belanja secara optimal, sehingga kinerja keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai secara maksimal (Wulandari et al., 2023).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kemampuan daerah dalam mengelola anggaran dan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah (Sarwono & Jundia, 2024). Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya (Nurlaela. et al., 2023). Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan pendapatan daerah yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran (Maryanti & Munandar, 2021a). Rasio ini menunjukkan seberapa besar pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan daerah. Semakin rendah nilai rasio efisiensi, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Suatu daerah dikatakan efisien apabila nilai rasio efisiensinya berada di bawah 100%, sedangkan nilai di atas 100% menunjukkan kondisi yang tidak efisien (Utari. et al., 2023). Selain itu, rasio efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan yang telah ditetapkan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah direncanakan (Maryanti & Munandar, 2021). Tingkat efektivitas dikategorikan sangat efektif apabila nilainya lebih dari 100%, efektif apabila berada pada kisaran 90% - 100%, cukup efektif pada kisaran 80% - 90%, kurang efektif pada kisaran 60% - 80%, dan tidak efektif apabila kurang dari 60% (Bukhori. & Yazid., 2021).

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perkembangan kinerja keuangan daerah dari satu periode ke periode berikutnya (Zaitul et al., 2023). Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian keuangannya dari tahun ke tahun. Nilai pertumbuhan yang positif mengindikasikan adanya peningkatan kinerja keuangan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan terjadinya penurunan kinerja keuangan daerah (Oktaviani et al., 2022). Sementara itu, rasio ketergantungan fiskal merupakan perbandingan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Digdowiseiso & Satrio, 2022). Rasio ini menunjukkan sejauh mana kebutuhan pembiayaan daerah masih bergantung pada dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan fiskal dikategorikan rendah apabila nilainya kurang dari 25%, sedang apabila berada pada kisaran 25% - 50%, dan tinggi apabila melebihi 50%. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin besar ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat (Hadinata, 2024). Permasalahan tersebut juga tercermin pada Pemerintah Kota Jambi. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan tahun 2020–2024, capaian pendapatan daerah menunjukkan kondisi

yang fluktuatif dan belum mencapai target secara konsisten. Pada beberapa tahun tertentu, realisasi pendapatan berada di bawah target yang ditetapkan, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah (Irmayanto., 2004). Selain dari sisi pendapatan, pengelolaan belanja daerah juga menjadi aspek penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja daerah yang tidak dikelola secara efisien berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan mengurangi manfaat yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap efisiensi penggunaan anggaran daerah menjadi penting untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Oktaviani et al., 2022). Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tahun anggaran 2020–2024 untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan serta belanja daerah, serta mengidentifikasi tingkat kemandirian fiskal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, tantangan utama bagi pemerintah atau organisasi sektor publik saat ini adalah meningkatkan kedekatan dengan masyarakat serta memperbaiki kualitas pelayanan publik agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Fazlurahman et al., 2020).

Berdasarkan hasil publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi. Dapat dilihat jumlah belanja dan pendapatan di pemerintah Kota Jambi. Terlihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama periode 2020–2024 belum menunjukkan kondisi yang stabil. Realisasi pendapatan daerah pada beberapa tahun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sementara belanja operasi cenderung tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut mencerminkan adanya permasalahan dalam efektivitas pengelolaan pendapatan serta efisiensi penggunaan anggaran daerah. Selain itu, fluktuasi pendapatan dan belanja menunjukkan perlunya analisis pertumbuhan keuangan daerah, serta tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan dari luar daerah. Oleh karena itu, analisis kinerja keuangan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio ketergantungan fiskal. Penelitian terkait analisis kinerja keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian oleh G.Yulia Novita Sari, Satria Tri Nanda, Ika Berty tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif

(Sari et al., 2022). Selain itu, Selain itu, penelitian oleh Dewi dan Setiawan tahun 2023 dalam penelitiannya pada Kabupaten Cilacap tahun 2018–2022 ahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah serta struktur pendapatan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Dewi & Setiawan, 2023). Penelitian terbaru oleh Praditya and Yusuf tahun 2025 juga menunjukkan juga menunjukkan bahwa meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah tergolong efektif, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih relatif tinggi (Praditya & Yusuf, 2025). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan periode tertentu, sehingga belum mampu merepresentasikan kondisi keuangan daerah dengan karakteristik yang berbeda secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dengan menggunakan empat indikator utama, yaitu rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan, dan rasio ketergantungan fiskal yang dirangkum dalam penelitian berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020–2024”.

2. KAJIAN TEORITIS

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, adil, dan berlandaskan hukum. Pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Zaitul et al., 2023). Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran penting yang menunjukkan seberapa baik daerah tersebut dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang dimiliki, dan pengukuran ini memastikan bahwa program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta penggunaan keuangan publik dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan (Fadhila. et al., 2022). Salah satu aspek kunci adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni pendapatan yang diperoleh secara mandiri melalui pajak dan retribusi daerah (Siregar., 2023). Berbagai penelitian menggunakan rasio keuangan seperti rasio kemandirian, desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi, dan belanja untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah, dan perbandingan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki kemampuan pembiayaan pemerintah yang lebih baik dengan indeks kemampuan keuangan tinggi, sementara Jawa Timur masih dalam kategori menengah (Sarwono dan Jundia 2024).

Analisis rasio keuangan adalah sebuah alat analitis penting yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan entitas publik seperti pemerintah daerah, dengan melihat hubungan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan (Wulandari. et al., 2023). Dengan rasio-rasio keuangan, kita dapat memahami seberapa baik pemerintah daerah mengelola anggaran mereka, sejauh mana pendapatan sendiri (PAD) digunakan secara optimal, dan bagaimana efisiensi pengeluaran dijalankan. Dalam konteks publik, rasio tersebut sering mencerminkan aspek kemandirian fiskal, efisiensi belanja, efektivitas pendapatan, dan pertumbuhan keuangan (Oktaviani et al., 2022). Rasio Efisiensi adalah konsep yang digunakan untuk melihat seberapa baik suatu organisasi menggunakan sumber daya yang dimilikinya seperti waktu, tenaga, dana, dan peralatan untuk menghasilkan suatu output atau hasil tertentu. Dalam pengukuran efisiensi, yang dinilai adalah hubungan antara *input* (masukan) dan *output* (keluaran) (Panggabea., 2024). Suatu kegiatan dianggap efisien apabila mampu menghasilkan output yang lebih besar dengan jumlah input yang sama, atau mampu menghasilkan output yang sama dengan menggunakan input yang lebih sedikit. Dengan kata lain, efisiensi terjadi ketika organisasi dapat mencapai hasil maksimal tanpa melakukan pemborosan sumber daya (Maryanti & Munandar, 2021). Rasio Efektivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa jauh suatu kegiatan, program, atau kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus utama efektivitas terletak pada pencapaian hasil (*outcome*), bukan pada jumlah biaya, tenaga, atau sumber daya yang dikeluarkan (Maryanti & Munandar, 2021). Rasio pertumbuhan adalah ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan (pertumbuhan) elemen keuangan, seperti pendapatan daerah, PAD, belanja modal, atau belanja operasional dari satu periode ke periode berikutnya (Fornia et al., 2021). Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah (atau instansi publik) dalam mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangannya dari tahun ke tahun (Oktaviani et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan variabel atau membuat generalisasi statistik, melainkan untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah melalui analisis data sekunder yang tersedia. Data yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, dan dokumen resmi lainnya. Pada penelitian ini, perhitungan rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio ketergantungan fiskal dilakukan sebagai alat bantu untuk menggambarkan kondisi keuangan daerah. Hasil perhitungan tersebut kemudian dijelaskan secara naratif untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi

selama periode 2020–2024. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif karena fokus utamanya memberikan gambaran nyata berdasarkan dokumen resmi, bukan menguji hubungan statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk kuantitatif, yaitu data berupa angka yang diperoleh dari dokumen resmi tanpa melalui proses pengumpulan langsung oleh peneliti. Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan berupa data keuangan yang diambil dari laporan resmi pemerintah daerah, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Jambi untuk periode 2020–2024. Data tersebut meliputi anggaran pendapatan, realisasi pendapatan, realisasi belanja operasi, data pendukung lain pada laporan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen pendukung lain, seperti laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan neraca), dokumen instansi (laporan tahunan dan laporan kinerja), publikasi resmi (website pemerintah atau lembaga terkait). Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis rasio keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Perhitungan ketiga rasio tersebut didasarkan pada data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran periode 2020–2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

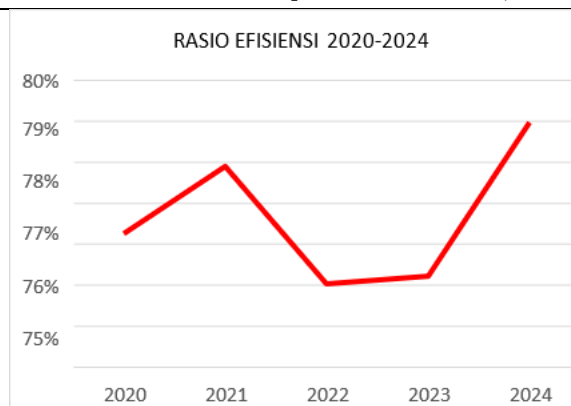
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dengan melihat sejauh mana pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, serta program selama periode 2020-2024. Dalam proses analisis, digunakan beberapa indikator berupa rasio keuangan, yaitu rasio efisiensi, efektivitas, pertumbuhan, dan ketergantungan fiskal. Data yang dipakai bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran milik Pemerintah Kota Jambi. Berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan penilaian terhadap kondisi dan kinerja keuangan daerah. Hasil perhitungan dari masing-masing rasio tersebut menunjukkan bahwa:

Rasio Efisiensi

Tabel 1. Rasio Efisiensi.

Tahun	Rumus	Perhitungan	Nilai Kategori
2020	Rasio Efisiensi = $(\text{Realisasi Belanja Operasi} / \text{Total PAD}) \times 100\%$	$(\text{Rp1.180.536.624.523} / \text{Rp1.548.618.616.649}) \times 100\%$	76% Efisien
2021	Rasio Efisiensi = $(\text{Realisasi Belanja Operasi} / \text{Total PAD}) \times 100\%$	$(\text{Rp1.238.942.121.720} / \text{Rp1.590.757.446.537}) \times 100\%$	78% Efisien
2022	Rasio Efisiensi = $(\text{Realisasi Belanja Operasi} / \text{Total PAD}) \times 100\%$	$(\text{Rp1.250.909.815.843} / \text{Rp1.667.899.848.576}) \times 100\%$	75% Efisien

Tahun	Rumus	Perhitungan	Nilai Kategori
2023	Rasio Efisiensi = (Realisasi Belanja Operasi / Total PAD) × 100%	(Rp1.250.254.714.177 / Rp1.662.716.449.930) × 100%	75% Efisien
2024	Rasio Efisiensi = (Realisasi Belanja Operasi / Total PAD) × 100%	(Rp1.392.635.404.500 / Rp1.763.723.847.528) × 100%	79% Efisien



Gambar 1. Grafik Rasio Efisiensi.

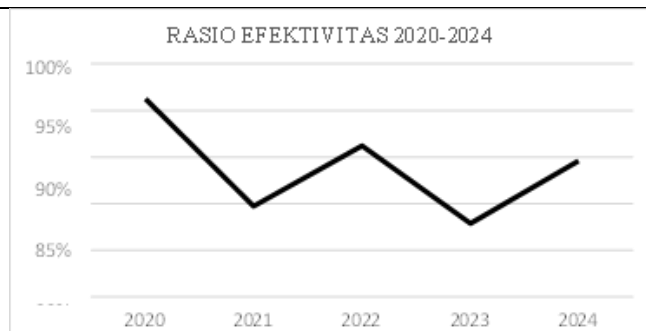
Berdasarkan grafik Rasio Efisiensi Tahun 2020–2024, terlihat bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah mengalami pergerakan yang fluktuatif, namun tetap berada dalam rentang yang relatif stabil. Nilai rasio selama periode penelitian berada pada kisaran 74% hingga 79%. Pada tahun 2020, rasio efisiensi berada di sekitar 76%, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sekitar 78%. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan proporsi belanja operasional dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya, pada tahun 2022 rasio efisiensi menurun menjadi sekitar 75%, yang mengindikasikan bahwa pengeluaran daerah pada tahun tersebut lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2023, rasio efisiensi mengalami sedikit kenaikan namun masih dalam batas yang stabil. Pada tahun 2024, rasio kembali meningkat hingga mendekati 79%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Secara keseluruhan, seluruh nilai rasio berada pada kategori efisien karena masih berada di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola belanja operasional secara cukup baik tanpa melampaui pendapatan yang tersedia. Namun, tren peningkatan pada akhir periode perlu diperhatikan agar tingkat efisiensi tidak mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

Rasio Efektivitas

Tabel 2. Rasio Efektivitas.

Tahun	Nilai	Kategori	Rumus	Perhitungan
2020	96%	Efektif	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{PAD}} \times 100$	$\frac{\text{PADRp355.674.818.034}}{\text{PADRp369.594.193.000}} \times 100$
2021	85%	Cukup Efektif	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{PAD}} \times 100$	$\frac{\text{PADRp384.730.643.791}}{\text{PADRp454.001.834.233}} \times 100$

2022	91%	Efektif	Realisasi Anggaran x100	PADRp437.025.956.388 PADRp479.170.812.838	x100
2023	83%	Cukup Efektif	Realisasi Anggaran x100	PADRp448.460.640.789 PADRp541.087.970.969	x100
2024	90%	Efektif	Realisasi Anggaran x100	PADRp455.255.451.610 PADRp508.179.874.938	x100

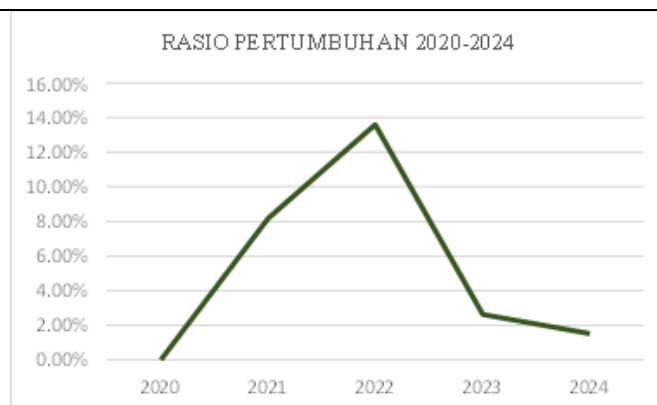


Gambar 2. Grafik Rasio Efektivitas.

Berdasarkan grafik Rasio Efektivitas Tahun 2020–2024, terlihat bahwa tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pola fluktuatif selama periode penelitian. Pada tahun 2020, rasio efektivitas berada pada kisaran 96%, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD hampir mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan cukup signifikan hingga sekitar 85%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa realisasi PAD pada tahun tersebut belum mampu memenuhi target secara optimal. Tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan, dengan rasio meningkat kembali hingga sekitar 91%. Akan tetapi, pada tahun 2023 rasio kembali mengalami penurunan menjadi sekitar 83%, yang merupakan titik terendah selama periode pengamatan. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali hingga mendekati 90%. Secara keseluruhan, meskipun nilai rasio berada dalam kategori efektif dan cukup efektif, pergerakan yang tidak stabil menunjukkan bahwa pencapaian target PAD belum konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya optimalisasi penerimaan daerah agar tingkat efektivitas dapat dipertahankan atau ditingkatkan secara berkelanjutan.

Rasio Pertumbuhan**Tabel 3.** Rasio Pertumbuhan.

Tahun	Nilai	Kategori	Rumus	Perhitungan
2020				
2021	8%	Positif	$\frac{\text{Pendapatan T0} - \text{Pendapatan T1}}{\text{Pendapatan T0}} \times 100$	$\frac{\text{Rp384.730.643.791} - \text{Rp355.674.818.034}}{\text{Rp355.674.818.034}} \times 100$
2022	14%	Positif	$\frac{\text{Pendapatan T0} - \text{Pendapatan T1}}{\text{Pendapatan T0}} \times 100$	$\frac{\text{Rp437.025.956.388} - \text{Rp384.730.643.791}}{\text{Rp384.730.643.791}} \times 100$
2023	3%	Positif	$\frac{\text{Pendapatan T0} - \text{Pendapatan T1}}{\text{Pendapatan T0}} \times 100$	$\frac{\text{Rp448.460.640.789} - \text{Rp437.025.956.388}}{\text{Rp437.025.956.388}} \times 100$
2024	2%	Positif	$\frac{\text{Pendapatan T0} - \text{Pendapatan T1}}{\text{Pendapatan T0}} \times 100$	$\frac{\text{Rp455.255.451.610} - \text{Rp448.460.640.789}}{\text{Rp448.460.640.789}} \times 100$

**Gambar 3.** Grafik Rasio Pertumbuhan.

Berdasarkan grafik Rasio Pertumbuhan PAD Tahun 2020–2024, terlihat bahwa pertumbuhan PAD menunjukkan pola yang meningkat pada awal periode, kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020, pertumbuhan berada pada titik awal yaitu 0%, karena belum terdapat pembandingan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan meningkat menjadi 8%, yang menunjukkan adanya kenaikan PAD dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 14%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup drastis hingga 3%. Penurunan ini menunjukkan bahwa laju peningkatan PAD melambat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024 pertumbuhan kembali menurun hingga berada di angka 2%. Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan PAD selama periode penelitian masih berada pada kategori positif (tidak mengalami pertumbuhan negatif), tren yang terus menurun sejak tahun 2022 mengindikasikan adanya perlambatan dalam peningkatan

pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan upaya optimalisasi dan inovasi dalam meningkatkan sumber-sumber PAD agar pertumbuhan dapat kembali stabil dan berkelanjutan.

Rasio Ketergantungan Fiskal

Tabel 4. Rasio Ketergantungan Fiskal.

Tahun	Rumus	Perhitungan	Nilai	Kategori
2020	Rasio Ketergantungan = (Pendapatan Transfer / Total PAD) $\times$ 100%	(Rp1.192.943.798.615 / Rp1.548.618.616.649) $\times$ 100%	77%	Tinggi
2021	Rasio Ketergantungan = (Pendapatan Transfer / Total PAD) $\times$ 100%	(Rp1.206.026.802.746 / Rp1.590.757.446.537) $\times$ 100%	76%	Tinggi
2022	Rasio Ketergantungan = (Pendapatan Transfer / Total PAD) $\times$ 100%	(Rp1.230.873.892.188 / Rp1.667.899.848.576) $\times$ 100%	74%	Tinggi
2023	Rasio Ketergantungan = (Pendapatan Transfer / Total PAD) $\times$ 100%	(Rp1.214.255.809.141 / Rp1.662.716.449.930) $\times$ 100%	73%	Tinggi
2024	Rasio Ketergantungan = (Pendapatan Transfer / Total PAD) $\times$ 100%	(Rp1.308.468.395.918 / Rp1.763.723.847.528) $\times$ 100%	74%	Tinggi



Gambar 4. Grafik Rasio Ketergantungan Fiskal.

Berdasarkan grafik Rasio Ketergantungan Fiskal Tahun 2020–2024, terlihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat masih tergolong tinggi, meskipun sempat mengalami penurunan selama beberapa tahun. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan berada pada kisaran 77%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2021, rasio tersebut menurun menjadi sekitar 76%, dan kembali menurun pada tahun 2022 hingga sekitar 74%. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan rasio mencapai sekitar 73%, yang merupakan nilai terendah selama periode penelitian. Kondisi ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah. Namun, pada tahun 2024 rasio kembali meningkat hingga sekitar 74%, yang mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer kembali bertambah. Secara keseluruhan, seluruh nilai rasio berada di atas 70%, sehingga dapat dikategorikan sebagai tingkat ketergantungan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan keuangan secara mandiri melalui

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan PAD guna memperkuat kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.

Pembahasan

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran secara optimal agar penggunaan anggaran dapat dilakukan secara hemat dan tepat guna (Maryanti & Munandar, 2021). Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 1, rasio efisiensi Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2020–2024 berada pada kisaran 75%–79%. Nilai persentase tersebut diperoleh dari perbandingan antara realisasi belanja operasi dengan realisasi pendapatan daerah berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tergolong efisien karena nilai rasio berada di bawah 100%, sehingga pemerintah daerah dinilai cukup mampu mengendalikan pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Rasio efektivitas digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan (Maryanti & Munandar, 2021). Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2, rasio efektivitas Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2020–2024 berada pada kisaran 83%–96%. Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target PAD berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merealisasikan target PAD karena nilai rasio berada mendekati bahkan mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga tingkat efektivitas pengelolaan PAD tergolong cukup efektif hingga efektif.

Rasio pertumbuhan digunakan untuk melihat perkembangan kondisi keuangan daerah dari tahun ke tahun (Oktaviani et al., 2022). Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3, pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Jambi menunjukkan nilai positif selama periode penelitian. Pertumbuhan PAD tercatat sebesar 8% pada tahun 2021, meningkat menjadi 14% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 3% pada tahun 2023 dan 2% pada tahun 2024. Nilai persentase tersebut diperoleh dari hasil perbandingan pertumbuhan realisasi PAD tahun berjalan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil tersebut menunjukkan bahwa PAD Pemerintah Kota Jambi masih mengalami pertumbuhan setiap tahunnya karena seluruh nilai rasio berada pada nilai positif. Namun, penurunan persentase pertumbuhan pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa laju peningkatan PAD mulai melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio ketergantungan fiskal digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah (Digdowiseiso & Satrio, 2022). Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4, rasio ketergantungan fiskal Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2020–2024 berada pada kisaran 73%–77%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan antara pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Kota Jambi masih tergolong tinggi karena menunjukkan angka di atas 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih belum optimal sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Secara keseluruhan, hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi tahun 2020–2024 berada pada kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari tingkat efisiensi dan efektivitas yang tergolong baik, serta pertumbuhan PAD yang masih menunjukkan nilai positif meskipun mengalami perlambatan pada akhir periode penelitian. Namun demikian, tingkat ketergantungan fiskal yang masih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kemandirian fiskal daerah dapat meningkat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi pada periode anggaran 2020–2024, yaitu ditinjau dari rasio efisiensi, kinerja keuangan daerah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan rasio efektivitas, pencapaian pendapatan daerah tergolong efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari sisi rasio pertumbuhan, kinerja keuangan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode penelitian. Namun, jika dilihat dari rasio ketergantungan fiskal, tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat masih tergolong tinggi.

DAFTAR REFERENSI

- Bukhori., & Yazid. (2021). Analisis Rasio Kerasian Belanja Modal Dan Daerah Di Pemerintahan Daerah Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 10, 41–55.
- Dewi, N., & Setiawan, A. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun anggaran. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 4(5), 5929–5938.
- Digdowiseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Jurnal Fair Value. *Jurnal Fair Value*, 4(3), 1170–1181.
- Fadhila., Novi., & Tanjung., J. S. (2022). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan

- Value For Money. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 1(2), 126–134. <https://doi.org/10.59086/jeb.v1i2.50>.
- Fazlurahman, D., Fatriananda, C., & Jauhari, R. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Bandung sebelum dan setelah mendapatkan opini WTP dari BPK. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(1), 56–62.
- Fornia, E., Mukhzarudfa, M., & Gowon, M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(1), 34–44. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i1.13301>
- Hadinata, D. F. (2024). Analisis kinerja keuangan berbasis data. *Jurnal Akuntansi Modern*, 2(2), 496–502.
- Hartoto, H. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Teori dan praktik)*. Widina Media Utama.
- Irmayanto., J. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Universitas Trisakti.
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis Value For Money untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015 - 2019. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2886–2899.
- Nurlaela., Hergastyasmawan., A., Akal., A. T. U., Sarnawiah., Meta., W., Bakhtiar., S., G., S., Nurwahidah., & Tamara., A. P. (2023). *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Oktaviani, E., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Pada Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(1), 77–85.
- Panggabean., S. E. A. (2024). equilibrium: Jurnal Bisnis & Akuntansi (EJBA) Potret Kemandirian, Efisiensi, dan Efektivitas Keuangan Kota Pontianak. *Bisnis & Akuntansi (EJBA)*, 18(1), 3046–7977.
- Praditya, R. A., & Yusuf, A. M. (2025). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Balikpapan tahun 2018–2023. *Jurnal Keuangan Daerah*, 22(1), 45–54.
- Sari, G. Y. N., Nanda, S. T., Berty, I., & Zenita, R. (2022). Pengertian input. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 56–65.
- Sarwono, A. E., & Jundia, H. S. (2024). Financial performance based on the local government budget. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 10(1), 148–165.
- Siregar., H. A. (2023). Analisis Dampak Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis.*, 8(2).
- Utari., R., Anisa., Nursyabani., In., H., Rizka, R. B., & Kurniawan., S. (2023). analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektifitas (Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021-2022). *Jurnal Eko-Bisma*, 2(2), 204–211.
- Wulandari., Riska., Lestari., B. A. H., & Suryantara., A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>
- Zaitul, Z., Ilona, D., & Novianti, N. (2023). Good Governance in Rural Local Administration. *Administrative Sciences*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.3390/admsci13010019>